

Kepentingan Ekonomi-Politik Rusia Dalam Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia Tahun 2015 Di Era Vladimir Putin

Fenny Alfrianda E.

20120510105

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

fenny.alfrianda@gmail.com

Abstract

This research focuses on the economic and political interest of Russia in formation of the Eurasian Economic Union in 2015 during the reign of Vladimir Putin. The Eurasian Economic Union signed by the leader of the Russia, Kazakhstan and Belarus in May, 29th 2014 and Planned start in January, 1st 2015. With a qualitative approach, this research emphasizes the content analysis method. Framework in this research departs from the integration theory, including political and economic integration and the rational actor model. The results of this research indicate that the forming of The Eurasian Economic Union are affected for development of member states's trade volume, GDP, Oil Production, etc. Moreover, the development of trade volume has negative effects to raising the asymmetry relations between the member states of The Eurasian Economic Union, where Russia has the domination in the trade volume based on the imbalance export-import within The Eurasian Economic Union. That condition assume that the government of Russia using The Eurasian Economic Union to achieve the national economic interest and also to improve the national political interest. The decisions of Vladimir Putin in regarding to forming of The Eurasian Economic Union is the efforts of Russia to relieve the domination of European Union and WTO in economic sectors and create the equal power for the hegemony of United States and NATO, In addition, the efforts of Russia to maintain its influences in Post-Soviet States as ambition of Russia to create "The Modern Uni Soviet".

Keywords : *Russia, Eurasian Economic Union, Vladimir Putin, Integration*

Pendahuluan

Rusia merupakan sebuah negara besar dan memiliki posisi tawar yang kuat di masyarakat internasional dengan luas wilayah + 17,075,400 km² (One World Nations Online). Rusia merupakan penghubung antara benua Eropa dan Asia, dan juga berbatasan dengan benua Amerika Utara (EENI). Posisi tawar yang kuat dari

Rusia itu sendiri tidak dapat terlepas dari Sejarah Uni Soviet yang pernah menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan dahulu, selain itu juga dipengaruhi oleh Sejarah pembentukan negara Federasi Rusia.

Bubaranya Uni Soviet menjadikan Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet yang telah mengubah orientasi, tujuan dan pola formulasi kebijakan serta tindakan politik luar negeri negara Rusia. Rusia saat ini masih merupakan negara besar yang berpengaruh baik dalam bidang ekonomi maupun politik, Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya usaha Rusia untuk mempertahankan eksistensinya di dunia internasional meskipun saat ini dikelilingi oleh beberapa bentuk integrasi regional yang mendominasi, seperti Uni Eropa, WTO, dan lain-lain.

Dalam catatan sejarah negara Rusia, Para pemimpin Rusia yang terdahulu tidak memiliki kebijakan yang kuat dalam hal ekonomi dan politik. Rusia mengalami perubahan positif saat kepemimpinan periode kedua dari Vladimir Putin. Vladimir memiliki kebijakan *outlooking* dalam memajukan ekonomi-politik dari Rusia terbukti dalam hal ekspor dan GDP Negara Rusia mengalami peningkatan dan tingkat inflasi dapat ditekan. Namun, dalam hal kebijakan luar negeri Putin dipandang memiliki ciri khas tersendiri dan berani menawarkan salah satu perekonomian paling dinamis yang berkembang dan menarik di dunia dengan membentuk Uni Ekonomi Eurasia.

Kondisi yang mempengaruhi Rusia dalam hal kepentingan untuk membentuk Uni Ekonomi Eurasia karena telah terjadi perselisihan ekonomi antara Rusia dengan beberapa negara bekas Uni Soviet, seperti Ukraina dan Georgia. Sejak Tahun 2002 telah terjadi pelarangan import anggur Georgia oleh Rusia di tahun 2006 dan adanya langkah-langkah Uni Eropa yang ingin menggabungkan sejumlah negara persemakmuran ke Uni tersebut serta berlanjutnya agenda *Eastern partnership*.

Uni Ekonomi Eurasia merupakan uni kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh pemimpin negara Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada tanggal 29 Mei 2014 (Time). Pengoperasian Uni Ekonomi Eurasia akan meningkatkan pertukaran perdagangan di antara negara-negara anggotanya dengan lebih mudah setelah sebelumnya terjadi pembentukan Sebuah perjanjian bersejarah Uni Ekonomi Eurasia yang diprakarsai oleh tiga negara pendiri, yakni Presiden Rusia (Vladimir Putin), Presiden Kazakhstan (Nursultan Nazarbayev), dan Presiden Belarus (Alyaksandr Lukashenka) yang ditandatangani di kota Lukashenka yang ditandatangani di kota Astana dan berlaku pada 1 Januari 2015 yang berfungsi untuk memberlakukan perdagangan bebas, Aliansi ini juga mengoordinasikan sistem keuangan para anggotanya, mengatur bersama industri dan kebijakan pertanian, serta mengembangkan jaringan transportasi dan pasar tenaga kerja (Kompas.com).

Ide yang didasarkan pada integrasi Uni Eropa ini diperkenalkan pada Oktober 2011 oleh Vladimir Putin (G. Bryanski), namun pertama kali dikonsepsikan oleh Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev dalam pidato tahun 1994 di Universitas Moskow, kurang dari tiga tahun setelah pembubaran Uni Soviet (The Daily

Telegraph, 2011). Adapun Tujuan-tujuan dari Uni Ekonomi Eurasia adalah penghapusan secara bertahap atas aturan Bea Cukai internal di negara dan menempatkan tariff luar negeri umum di antara negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, serta menyelaraskan prosedur bea cukai di negara-negara anggota. Para kepala negara dan perdana menteri Rusia, Belarus dan Kazakhstan akan menjadi anggota Dewan Eurasia dan menentukan agenda-agenda Uni Ekonomi Eurasia (The Daily Telegraph). Integrasi ini berdasarkan integrasi yang dibangun negara-negara Eropa Barat berupa Uni Eropa sebagai sebuah integrasi yang berhasil menaikkan ekonomi negara-negara anggotanya. Dalam hal pencapaian kepentingan Rusia dalam pembentukan Uni Ekonomi Eurasia menghadapi tantangan besar yakni adanya upaya Barat untuk menarik sejumlah negara di wilayah luar dekat Rusia seperti Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Model Aktor Rasional

Pada uraian mengapa Rusia pada era Vladimir Putin membentuk Uni Ekonomi Eurasia di Tahun 2015, Penulis menitik beratkan pada tingkat politik luar negeri Rusia dalam pencapaian tujuan nasionalnya. Untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas, Penulis menggunakan Model Aktor Rasional.

Dalam studi Hubungan Internasional, kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (rational action) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional dan hanya dapat berarti sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, serta sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa (Warsito, 1998).

Teorisasi dalam Hubungan Internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik.

Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional untuk dapat mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

Menurut Graham T. Allison, Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (decision maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Olton, 1999). Sehingga di dalam model aktor rasional dapat digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atau alternatif menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya dan juga dapat memperoleh informasi yang cukup, sehingga dapat melakukan penelusuran terhadap alternatif kebijakan yang akan dilakukan atau sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa Graham T. Allison memberikan gambaran bahwa politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum membuat keputusan. Dalam proses pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dimana pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada, maka unit analisis pada pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari bangsa itu sendiri.

Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan pada umumnya, keputusan-keputusan terutama berkaitan dengan politik luar negeri di buat secara rasional dan dengan proses yang tidak mudah (instan). Karena itulah, Graham T. Allison beranggapan bahwa model ini adalah model yang tepat untuk diterapkan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

Mohtar Mas'ood dalam bukunya, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi" mengatakan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahapan-tahapan intelektual dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh dan berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu." (Mas'ood M. , 1990)

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Teori Integrasi

Menurut Walter S, Jones dalam bukunya "Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2", mengatakan bahwa Integrasi Internasional merupakan proses pencapaian kondisi supranasional dimana urusan yang semula ditangani pemerintah nasional beralih ke unit-unit politik yang lebih besar. Integrasi internasional secara singkat didefinisikan sebagai proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat yang baru dan lebih besar, yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yurisdiksi yang semula berada ditangan negara bangsa (Kusumohamidjojo, 1993).

Kemudian Konsep Integrasi didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh Joseph Nye dengan membagi ke dalam beberapa bagian atau dimensi untuk menciptakan indikator agar dapat mengukurnya. Konsep Integrasi bisa dibagi menjadi Integrasi Ekonomi (pembentukan suatu ekonomi transnasional), integrasi sosial (pembentukan masyarakat transnasional) dan Integrasi politik (pembentukan sistem transnasional).

Terkait permasalahan ini, maka penulis akan mencoba menjelaskan permasalahan terkait pada kedua bentuk konsep Integrasi, yakni integrasi ekonomi dan politik.

1. Integrasi Ekonomi

Menurut Holzman, integrasi ekonomi adalah situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Definisi ini menggambarkan bahwa terdapat lembaga yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa dan faktor produksi di dalam sebuah kawasan. Hal ini berkesinambungan dengan tujuan dari pembentukan Uni Ekonomi Eurasia dalam mencapai sebuah bentuk integrasi dengan beragam bentuk kerjasama yang sudah menjadi komitmen antar negara anggota Uni Ekonomi Eurasia antara lain kerjasama di sektor energi, industri, pertanian dan transportasi. Terlebih jika melihat dari keberadaan Uni Ekonomi Eurasia yang tidak bisa dianggap sebelah mata, selain itu juga dipengaruhi oleh kapasitas perekonomian Rusia yang cukup besar, baik untuk kawasan Uni Eropa maupun dunia. Pengoperasian Uni Ekonomi Eurasia itu sendiri yang akan meningkatkan pertukaran perdagangan di antara negara-negara anggotanya dengan lebih mudah.

Terlebih Presiden Rusia, Vladimir Putin tengah menyusun peraturan yang bertujuan untuk mengeliminasi dolar AS dan euro dalam perdagangan dengan China melalui Transaksi Rubel-Yuan untuk mengubah Keuangan Dunia, sehingga upaya penciptaan pasar keuangan tunggal antara Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan negara-negara lain dari bekas Uni Soviet dapat segera terlaksana melalui kerjasama Rusia dengan China dalam hal penggunaan Yuan China untuk menumbangkan Hegemoni Dolar AS. Terkait kepentingan Rusia dengan adanya pemberlakuan Uni Ekonomi Eurasia bisa menjadi solusi strategis Moskow karena sejak lama Rusia telah mendorong negara-negara untuk bergabung dengan uni tersebut untuk menandingi Uni Eropa sehingga dapat menyaingi Uni Eropa, Cina dan Amerika Serikat dalam hal perekonomiannya.

2. Integrasi Politik

Charles Pentland 1973 di dalam *International Theory and European Integration* mendefinisikan bahwa Integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara bangsa yang mandiri, bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah “community”.

Hasil Pembahasan

Pandangan Rusia tentang Integrasi

Pada dasarnya, Sejarah menunjukkan bahwa Rusia pada masa Soviet menyukai integrasi karena mengingat banyaknya peristiwa integrasi yang terjadi diberbagai kawasan, seperti Integrasi yang terjadi di berbagai kawasan Soviet selama perang saudara setelah Revolusi Bolshevik serta “Rusiafikasi” atas penduduk Soviet

non Rusia. Pandangan Soviet tentang integrasi yang terjadi dahulu di Eropa Barat mengandung sebuah karakteristik, yakni memberikan keterbatasan bagi dominasi suatu negara, tetapi memberikan keuntungan bagi negara lainnya. Sebagai contoh dominasi Amerika Serikat terhadap NATO karena Eropa bergantung pada Amerika Serikat tetapi memberikan keuntungan bagi Rusia (Uni Soviet pada saat itu), Selain itu Integrasi merupakan sebuah langkah awal agar tetap seiring dengan sekutunya dalam hal politik, ekonomi dan keamanan (Jones W. S.).

Sejalan dengan Sejarah Integrasi yang memberikan efek positif bagi Uni Soviet, maka Integrasi bisa menjadi salah satu pilihan kebijakan yang bersifat rasional untuk dilakukan oleh Rusia dalam hal Politik luar negerinya. Pada dasarnya telah banyak inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi ataupun politik di antara negara-negara bekas Uni Soviet, Namun inisiatif-inisiatif tersebut belum memiliki arah ataupun hasil yang jelas.

Pasca runtuhnya Uni Soviet terdapat upaya yang jelas dari adanya pemisahan hegemoni kekaisaran. Beberapa negara berusaha untuk memisahkan diri dari Uni Soviet, dimana setelah memisahkan diri dari Uni Soviet, Negara-negara tersebut memilih untuk mengintegrasikan negaranya kepada Uni Eropa dan NATO yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara Rusia, sehingga salah satu kebijakan utama luar negeri dan keamanan Rusia adalah dengan tetap menjaga hubungan dengan bekas negara-negara Uni Soviet yang difungsikan untuk melemahkan fenomena disintegrasi yang akan terjadi.

Kebijakan Rusia terhadap Negara-negara Bekas Uni Soviet

Perihal pembentukan Uni Ekonomi Eurasia secara eksplisit dijelaskan dan diperkuat didalam kebijakan luar negeri Rusia tahun 2008, Dimana Kebijakan luar negeri Rusia condong untuk memperkuat kekuatan negaranya dan menjadikan Negara bekas Uni Soviet sebagai Fokus utama. Kebijakan tersebut merupakan deskripsi sistemik mengenai prinsip dasar, prioritas, tujuan dan fokus objektif kebijakan luar negeri atau GBHN (Garis Besar Haluan Negara) Rusia, sekaligus menjelaskan arah tujuan dan peran negara Rusia dalam dunia Internasional (President of Russia Official Web Portal).

Di dalam *Foreign Policy Concept* Rusia tahun 2008, Rusia secara spesifik berfokus pada CIS (Commonwealth of Independent States). CIS merupakan organisasi regional di bidang ekonomi yang dibentuk tahun 1991 oleh Rusia, Belarus, dan Ukraina sebagai Pendiri. Organisasi ini dibentuk sebagai upaya integrasi ekonomi Rusia dengan negara-negara bekas Uni Soviet. Organisasi regional ini memiliki dua belas anggota yakni Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Ukraina. Keterfokusan Rusia terhadap CIS diperkuat dengan pernyataan dalam *Foreign Policy Concept* Rusia tahun 2008 :

“ to consider the development of multilateral cooperation and integration processes within the CIS as a key area for Russia’s foreign policy; to implement a coherent policy toward further development of multi-faceted cooperation between CIS member states in socio-economic, humanitarian, law enforcement and other sectors.”
(Voltaire Network).

Berdasarkan *Foreign Policy Concept* tahun 2008 tersebut, secara jelas menggambarkan langkah yang akan diambil oleh Rusia dalam hal kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, baik secara bilateral dan multilateral Rusia melakukan kerjasama dan upaya dengan negara-negara anggota CIS sebagai wilayah prioritas utama dari kebijakan luar negerinya (Rossalina, 2014). Pada awal Oktober 2011, Putin menawarkan sebuah rencana untuk membuat Uni Ekonomi Eurasia yang termuat di dalam sebuah artikel di surat kabar Rusia, Izvestia dengan visi agar negara post Uni Soviet dapat berkoordinasi dalam hal kebijakan luar negeri, ekonomi yang difungsikan untuk menyatukan Negara anggota CIS dengan Negara bekas Uni Soviet. Gagasan tentang Uni Ekonomi Eurasia tersebut, menurut Vladimir Putin bukan merupakan langkah untuk mengembalikan Uni Soviet ataupun menggantikan *Commonwealth of Independent States* (CIS), tetapi sebuah integrasi berdasarkan nilai-nilai baru; dan berlandaskan ekonomi dan politik.

Proses dalam Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia

Integrasi dalam hal pencapaian kondisi supranasional harus melalui beberapa tahapan, sehingga bentuk integrasi memiliki beberapa perbedaan dimulai dari kawasan perdagangan bebas (dimana tariff perdagangan antar-anggota dihapus), serikat bea cukai (dimana tariff eksternal bersama ditambahkan untuk melengkapi kawasan perdagangan bebas), hingga berupa pasar bersama (dimana lalu-lintas tenaga kerja, modal, barang dan jasa diizinkan untuk bergerak dengan bebas). Langkah-langkah yang dibentuk dalam integrasi ekonomi yaitu berupa penyatuan moneter (penggunaan mata uang bersama), penggabungan sistem pajak, dan sebuah anggaran belanja nasional tunggal termasuk anggaran pertahanan bersama.

Dalam hal ini Uni Ekonomi Eurasia yang dibentuk oleh Rusia, Belarusia dan Kazakhstan dicanangkan akan memiliki mata uang sendiri, memiliki komisi perdagangan sendiri, pengadilan, bahkan bank pembangunan, serta parlemen sendiri seperti Parlemen Uni Eropa (Inilah.com). Hal yang dilakukan demi mewujudkan suatu bentuk integrasi mengharuskan Negara-negara yang ikut terlibat didalam integrasi tersebut untuk melakukan tahapan-tahapan dalam proses pembentukan sebuah Integrasi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rusia, Belarus, dan Kazakhstan untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketiga Negara tersebut mengumumkan peluncuran dari CU pada 1 Januari 2010 sekaligus peraturan yang

mengatur tariff dan non-tariff bersama serta pembentukan *Customs Union Commission*, dan pemenuhan akan prosedur pembentukan diselesaikan sebelum 1 Januari 2011. Selanjutnya pada Juli 2011 melakukan penghapusan kontrol pabean tanpa batas diantara ketiga Negara yang berguna untuk menghapus hambatan perdagangan.

Pada tahun 2011, Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin mendukung gagasan dari Nursultan Nazarbayev untuk membentuk Uni Ekonomi Eurasia (G. Bryanski), Pada 18 November 2011 Presiden Belarus, Kazakhstan, dan Rusia menandatangani sebuah perjanjian yang menetapkan target untuk pembentukan Uni ekonomi Eurasia pada tahun 2015 (BBC News, 2011)

Pada 1 Januari 2012, fokus baru dari upaya integrasi kebijakan luar negeri Rusia adalah *Common Economic Space* yang dibentuk oleh Rusia, Belarus dan Kazakhstan setelah menandatangani *Declaration of Eurasian Economic*. CES memungkinkan terjadinya arus barang secara bebas, jasa, saham, bahkan tenaga kerja juga bebas bergerak di tiga negara tersebut, dimana pergerakan tersebut meliputi 165 juta konsumen, Selain itu ketiga Negara juga sepakat untuk melakukan koordinasi pada sejumlah bidang meliputi bidang industri, transportasi, agrikultur dan energi termasuk upaya kerjasama produksi. Format baru dari integrasi ekonomi ini menggunakan manajemen integrasi ekonomi dengan tingkat yang lebih jauh. Pada dasarnya upaya Rusia untuk meningkatkan integrasi regional dimotivasi oleh adanya kepentingan ekonomi dan strategis. Perekonomian negara Rusia dipengaruhi oleh ekonomi pada era Uni Soviet, dimana di dalam hal struktur ekonomi terjadi penurunan *output* di bidang ekonomi.

Perjanjian tersebut juga meliputi haluan bagi integrasi masa depan dan membentuk *Eurasian Economic Commission* (meniru *European Commission* (BBC News) *Eurasian Economic Commission* (EEC) dibentuk pada 1 Juli 2012 di Moskow. Pembentukan EEC tersebut karena ketiga negara berencana untuk menggantikan *CU Commission*, dimana EEC memiliki sejumlah fungsi seperti implementasi kebijakan makro-ekonomi terkoordinasi di antara negara anggota, merancang rezim perdagangan dengan negara-negara lain, meregulasi aktifitas *natural monopolies*, dan pengembangan kebijakan bersama dalam mendukung produksi industri dan agrikultur. *Eurasian Economic Commission* juga berfungsi sebagai badan pengawas bagi *Eurasian Customs Union*, *The Single Economic Space* dan Uni Ekonomi Eurasia (Cistran Finance).

Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan bahwa tujuan pembentukan Uni Ekonomi Eurasia adalah untuk memperbesar Uni Bea Cukai bagi semua negara-negara post-Soviet, termasuk tiga negara Baltik anggota dari Uni Eropa. Uni Bea Cukai itu sendiri yang beranggotakan Belarus, Kazakhstan, dan Rusia (sekarang *Eurasian Customs Union*) muncul pada tanggal 1 Januari 2010 (Turkish Weekly, 2009). Prioritas Uni Bea Cukai adalah penghapusan tariff intra-blok, menetapkan kebijakan tariff eksternal umum dan penghapusan hambatan non-tariff, dimana hal

tersebut digunakan sebagai langkah pertama menuju pembentukan pasar tunggal yang lebih luas yang terinspirasi dari Uni Eropa dengan tujuan membentuk aliansi diantara negara-negara bekas Soviet (Kyiv Post). Negara-negara anggota merencanakan untuk melanjutkan integrasi ekonomi yang diatur untuk menghapus semua pembatas diantara mereka setelah Juli 2011. Didalam surat kabar The Guardian, rencana Putin untuk membentuk Uni ini adalah untuk tumbuh menjadi "sebuah uni supra-nasional yang kuat" dari negara-negara yang berdaulat seperti Uni Eropa (ekonomi bersama, sistem hukum, jasa kepabeanan, dan kemampuan militer) untuk menghubungkan Eropa dan Asia dan menyaingi Uni Eropa, AS, China, dan India (Henley, 2014). Selain itu, Deklarasi Integrasi Ekonomi Eurasia tidak dirancang hanya pada tujuan jangka pendek, namun juga menargetkan pengembangan berkelanjutan. Dan bagian terpenting dari adanya pembentukan deklarasi ini adalah sebagai target dari negara anggota untuk menyelesaikan seluruh persiapan yang dibutuhkan untuk mendirikan Uni Eurasia (Chufrin, 2012).

Pemberlakuan Uni Ekonomi Eurasia

Uni Ekonomi Eurasia mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, dimana Pengoperasian Uni Ekonomi Eurasia akan meningkatkan pertukaran perdagangan di antara negara-negara anggotanya dengan lebih mudah. Uni Ekonomi Eurasia memiliki tujuan-tujuan utama, yakni penghapusan secara bertahap atas aturan Bea Cukai internal di negara-negara anggota, menempatkan tariff luar negeri, dan menyelaraskan prosedur bea cukai diantara negara-negara anggota (The Moscow Times). Dengan dimulainya aktivitas dari Uni Ekonomi Eurasia tersebut, maka terciptalah sebuah pasar besar dalam konteks peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang didasarkan pada bentuk integrasi Uni Eropa. Dalam kerangka Uni Ekonomi Eurasia, para negara anggota memiliki pergerakan bebas atas barang dan komoditi, modal, tenaga kerja dan jasa di wilayah Eurasia, serta kebijakan umum di sektor energi, industri, pertanian dan transportasi (IRIB Indonesia). Uni Ekonomi Eurasia berusaha untuk membentuk sebuah model yang didasarkan pada Uni Eropa. Semua institusi menjalankan tugas berdasarkan pada Perjanjian tentang *Eurasian Economic Commission* (EEC) dan perjanjian internasional yang menyediakan kerangka hukum dan peraturan dari *Customs Union* dan *The Single Economic Space*.

Uni Ekonomi Eurasia dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan dari ekonomi makro, seperti mengurangi harga komoditas dengan mengurangi biaya transportasi bahan baku, meningkatkan laba atas teknologi baru dan produk karena volume pasar yang meningkat, dan mempromosikan persaingan sehat didalam pasar bersama. Uni Ekonomi Eurasia juga dirancang untuk menurunkan harga pangan, meningkatkan lapangan kerja di bidang industri dan meningkatkan kapasitas produksi (Center for Security Studies).

Uni Ekonomi Eurasia adalah sebuah organisasi internasional untuk integrasi ekonomi regional. Integrasi ini Memiliki hukum internasional sendiri dan didirikan berdasarkan Perjanjian tentang Uni Ekonomi Eurasia. Uni Ekonomi Eurasia menyediakan pergerakan bebas untuk barang, jasa, modal dan tenaga kerja, pencapaian yang terkoordinasi, kebijakan harmonisasi dan tunggal didalam sektor yang ditentukan oleh Perjanjian dan kesepakatan internasional dalam Integrasi ini. Anggota-anggota dari Uni Ekonomi Eurasia adalah Republik Armenia, Republik Belarus, Republik Kazakhstan, Republik Kyrgyzshtan dan Federasi Rusia. Uni Ekonomi Eurasia dibuat secara komprehensif untuk kemajuan, meningkatkan daya saing dan kerjasama diantara pencapaian ekonomi nasional, dan untuk mempromosikan pembangunan yang stabil dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia ini memberikan beberapa pertumbuhan di didalam beberapa sektor, antara lain : GDP, Produksi minyak, dll.

Kepentingan Ekonomi-Politik Rusia Dalam Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia

Uni Ekonomi Eurasia pada mulanya terdiri dari Rusia, Belarus dan Kazakhstan, dimana pada 1 Januari 2015 Uni Ekonomi Eurasia mulai direalisasikan. Sebagai hasil dari dimulainya aktivitas Uni Ekonomi Eurasia, maka diciptakan pasar besar dalam kerangka prinsip-prinsip WTO dengan disertai ikut bergabungnya Armenia dan Kyrgyzstan pada saat proses perealisasi Uni Ekonomi Eurasia tersebut. Bergabungnya kedua negara tersebut, dinilai akan mendorong kemajuan dan peningkatan dalam uni ini.

Pada dasarnya kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu Negara mempengaruhi peran dan sikap suatu negara di dalam kancah politik internasional. Kekuatan nasional tersebut terdiri dari beberapa unsur, yakni : geografi, populasi, sumber daya alam, kemampuan industri, kekuatan militer, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Unsur-unsur tersebut yang mendasari pemerintah dalam merumuskan kepentingan nasional yang tercermin di dalam kebijakan luar negerinya. Dalam pergaulan internasional, interaksi antar negara dilandasi oleh adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang menentukan sikap dan mengatur hubungan negara tersebut dengan negara lainnya di dalam pergaulan internasional.

Rusia memiliki kepentingan dalam pembentukan dan perealisasi dari Uni Ekonomi Eurasia. Vladimir Putin, Presiden Rusia memiliki pengaruh dan andil dalam pembentukan Uni Ekonomi Eurasia, dimana hal tersebut mempengaruhi kebijakan dari Vladimir Putin yang menjadikan Uni Ekonomi Eurasia sebagai fokus utama dalam hal pencapaian kepentingan nasional negaranya.

Kepentingan Ekonomi Rusia dalam Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia

Aktivitas dari Uni Ekonomi Eurasia merupakan hal yang penting dan menguntungkan bagi Rusia. Rusia berusaha mendorong negara-negara tetangga agar bergabung kedalam sebuah uni alternatif untuk menandingi Uni Eropa disertai pandangan bahwa pada akhirnya integrasi ini akan memberikan kemajuan yang positif bagi perekonomian negara Rusia. Uni Ekonomi Eurasia merupakan tahap akhir dari Integrasi di *Post Soviet Space* dengan model menyerupai Integrasi Uni Eropa yang ingin dicapai dan terealisasi pada 1 Januari 2015, dimana Uni Ekonomi Eurasia tidak hanya merupakan sebuah bentuk integrasi yang akan memberikan kemajuan dalam hal ekspor-impor saja, tetapi memiliki agenda besar sebagai sebuah bentuk integrasi yang dapat menyaingi perekonomian dari Uni Eropa, Cina dan Amerika Serikat.

Hubungan Asimetris antara Negara Anggota Uni Ekonomi Eurasia

Keberhasilan dari adanya penggabungan (integrasi) ditentukan oleh perimbangan kekuatan ekonomi antar negara anggota, dimana ketimpangan kekuatan ekonomi antar anggota didalam sebuah penggabungan (integrasi yang bersifat ekonomi) dapat menjadi hambatan yang akan memicu kerugian dalam kerjasama ataupun keuntungan bagi suatu pihak karena pendistribusian yang tidak merata.

Di dalam sebuah penggabungan (integrasi), tidak hanya beranggotakan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi saja tetapi juga terdapat beberapa negara yang memiliki ekonomi lemah yang menjadi anggota, sehingga ketimpangan dalam integrasi tersebut akan memberikan keuntungan yang terpusat kepada negara yang lebih kuat.

Dalam pembentukan integrasi ekonomi, yakni pada kasus Uni Ekonomi Eurasia, Rusia dapat digambarkan sebagai negara maju karena Rusia memiliki perekonomian terbesar ke-8 di dunia berdasarkan angka PDB dan terbesar ke-6 dengan keseimbangan daya beli, meskipun pada dasarnya pembentukan integrasi bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama negara anggota dan beberapa fungsi yang ingin dicapai dalam hal perealisasi pembentukan Uni Ekonomi Eurasia. Namun, kondisi perekonomian antar anggota Uni Ekonomi Eurasia memiliki perbedaan dalam hal volume perdagangan (ekspor dan impor), sehingga Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia ini membentuk “Ketidakseimbangan” (Budiono, 1992), meskipun pada dasarnya tujuan dari adanya pembentukan Uni Ekonomi Eurasia adalah untuk membuat perdagangan diantara negara-anggota menjadi lebih mudah.

Ketidakseimbangan ini ditunjukkan dengan melihat perbedaan angka ekspor-impor antara negara Rusia dengan negara anggota dan negara anggota dengan Rusia, dimana angka ekspor ataupun perdagangan yang dimiliki Rusia terhadap negara-

negara anggota lainnya bernilai tinggi, sehingga Rusia dapat menggunakan hal tersebut sebagai kontrol Rusia terhadap negara-negara anggota lainnya.

Pada dasarnya meskipun Rusia dan negara-negara anggota merupakan mitra dalam hal ekspor minyak negara Rusia, namun Rusia cenderung memiliki angka ekspor yang lebih tinggi, dimana angka impor Rusia terhadap Uni Eropa jauh lebih besar daripada angka impor Rusia terhadap negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan negara anggota Uni Ekonomi Eurasia lainnya, dimana angka impor negara mereka terhadap Rusia jauh lebih besar daripada eksportnya, seperti contoh Data Ekspor Rusia ke Uni Eropa pada tahun 2012 sebesar USD 184,090 million, Belarus sebesar USD 16,061 million dan Kazakhstan sebesar USD 10,160 million, sedangkan Data Import Rusia terhadap Uni Eropa pada tahun 2012 sebesar USD 83,416 million, Belarus sebesar USD 8,103 million, dan Kazakhstan sebesar USD 5,372 million (David).

Hal itu juga berdasarkan volume Perdagangan diantara negara Uni Ekonomi Eurasia, dimana perdagangan terbesar didominasi oleh negara Rusia, Pada Januari-Juni 2014 perdagangan negara Belarus memiliki nilai sebesar USD 7.991,20 million, Russia sebesar USD 18.345,20 million, Kazakhstan sebesar USD 3.540,80 million, Armenia sebesar USD 141,1 million, dan Kyrgyzstan sebesar USD 226,5 million. Pada Januari-Juni 2015 angka perdagangan negara Belarus memiliki nilai sebesar USD 5.312,80 million, Russia sebesar USD 14.417,60 million, Kazakhstan sebesar USD 2.674,30 million, Armenia sebesar USD 92,9 million, dan Kyrgyzstan sebesar USD 162,9 million.

Nilai Strategis Uni Ekonomi Eurasia Bagi Rusia

Jatuh-bangun Rusia dinilai menjadi awal kebangkitan dari negara ini, Rusia memiliki peningkatan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik di dalam negeri, meskipun kondisi Rusia semakin membaik namun masih terdapat ambisi dari Rusia untuk mengembalikan pengaruhnya seperti pada zaman Uni Soviet dahulu. Ambisi tersebut dijalankan dengan baik oleh Vladimir Putin, dimana Putin memiliki kebijakan ekspansi didalam bidang ekonomi. Kebijakan Rusia tersebut tertuang dalam hal pembentukan Uni Ekonomi Eurasia, pembentukan tersebut didasarkan karena adanya kepentingan Rusia dalam hal integrasi ini, dimana Keanggotaan Rusia dan Negara-negara bekas Uni Soviet didalam integrasi yang sama menjadi penting bagi Rusia karena memudahkan Negara ini untuk melakukan berbagai kerjasama.

Pengaruh Rusia di dunia melalui adanya Uni Ekonomi Eurasia semakin terlihat, perlahan-lahan mulai terbentuk dan terus meningkat dengan seiring perluasan anggota dan kerjasama antara Uni Ekonomi Eurasia dengan Negara-negara non anggota dari Uni Ekonomi Eurasia, seperti China. Di dalam sikap politik Negara pada bidang ekonomi, China dan Rusia, Vladimir Putin tengah menyusun peraturan yang bertujuan untuk mengeliminasi dolar AS dan euro dalam perdagangan dengan China

melalui Transaksi Rubel-Yuan untuk mengubah Keuangan Dunia, sehingga upaya penciptaan pasar keuangan tunggal dalam kerangka Uni Ekonomi Eurasia dapat segera terlaksana melalui kerjasama Rusia dengan China dalam hal penggunaan Yuan China untuk menumbangkan Hegemoni Dolar AS. Selain itu, melalui integrasi ini Rusia tidak hanya dapat memiliki prioritas ekonomi terhadap negara-negara bekas Uni Soviet saja tetapi juga dapat menyebarkan pengaruhnya ke Asia.

Bentuk kerjasama yang terjalin antara negara-negara di dunia dengan Uni Ekonomi Eurasia ini menjadi salah satu kepentingan nasional utama ataupun fokus terbaru dari negara Rusia, dimana dengan adanya pemberlakuan Uni Ekonomi Eurasia bisa menjadi solusi strategis Moskow untuk menandingi Uni Eropa dan dapat menyaingi Cina serta Amerika Serikat dalam hal perekonomiannya.

Sikap optimis dari Rusia akan terciptanya bentuk integrasi ekonomi yang menguntungkan tersebut seiring dengan adanya perjanjian perdagangan antara Rusia dengan negara-negara anggota. Perjanjian perdagangan tersebut termuat didalam bingkai Uni Ekonomi Eurasia, dimana didalam bagian empat dari perjanjian Uni Ekonomi Eurasia adalah menciptakan dasar untuk mencapai kompromi lebih lanjut dan menghapus pembatasan yang tersisa. Ketiga negara memberlakukan kewajiban untuk menjamin pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja (IRIB Indonesia).

Kepentingan Politik Rusia dalam Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia

Uni Ekonomi Eurasia adalah sebuah persekutuan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet yang digagas oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Persekutuan ini menjadi upaya Putin untuk mengembalikan Rusia seperti masa kejayaan “Uni Soviet” sebelum runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Jika dilihat melalui keterkaitan antar negara yang didaulat oleh Putin sebagai “Uni Ekonomi Eurasia” dan kondisi Hubungan Internasional pada masa saat ini yang mendorong bentuk interaksi kearah sistem multipolar dengan menampilkan kekuatan-kekuatan baru diberbagai kawasan, maka Rusia dituntut untuk ikut berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan baru, seperti: NATO, Uni Eropa, WTO, dan lain-lain yang dapat mengurangi pengaruh Rusia terhadap negara-negara bekas Uni Soviet. Rusia diharuskan untuk membentuk sebuah kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kekuatan tetapi juga lebih kepada pemikiran yang rasional dan pragmatis. Rusia berusaha untuk menghindari adanya bentuk perlombaan senjata dalam menyikapi permasalahan internasionalnya, namun kebijakan yang dilakukan tersebut tetap bertujuan untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Perilaku Rusia di dalam Politik Internasional saat ini menjadikan negaranya sebagai aktor dominan dalam pembentukan sistem internasional. Karakteristik yang dimiliki Rusia yang menginginkan adanya pembentukan “Rusia Baru” tersebut didasarkan pada kekuatan, kebebasan dan kesejahteraan yang tidak terlepas dari

adanya status *Super Power* yang pernah dimiliki Rusia pada masa Uni Soviet selama hampir empat puluh tahun.

Dalam hal pembuktian akan status Rusia sebagai salah satu Negara yang diperhitungkan dahulu (*Super Power*), Rusia akan melakukan upaya besar agar semua negara di wilayah luar dekat Rusia khususnya negara-negara penting seperti Kazakhstan, Belarus dan Ukraina tetap berada di bawah pengaruhnya. Upaya tersebut dilakukan Rusia melalui pembentukan Uni Ekonomi Eurasia yang dapat memberikan ikatan kuat bagi negara anggota dan ruang bagi Rusia untuk memiliki hak dalam mengontrol dan mencegah Ukraina agar tidak cenderung ke Barat.

Di dalam pembentukan integrasi, dalam hal ini Uni Ekonomi Eurasia terdapat kondisi-kondisi sebagai pendorong dari adanya integrasi tersebut, salah satunya adalah pengaruh-pengaruh eksternal (Kusumohamidjojo, 1993). Dalam hal ini, Rusia memandang bahwa pengaruh-pengaruh eksternal dalam kebijakan Rusia untuk menjadi salah satu pendiri Uni Ekonomi Eurasia adalah adanya ancaman eksternal bagi keamanan dan stabilitas negaranya, yakni ancaman Uni Eropa terhadap pengaruh Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet.

Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia dinilai dapat menjadi jalan bagi Rusia untuk mengurangi upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa terus berusaha untuk meminimalisir hubungan antara Rusia dengan wilayah luar dekat Rusia, salah satu cara Uni Eropa dapat dilihat dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari di Riga, Latvia Pada hari Kamis, 21 Mei 2015. Dalam konferensi tersebut, Uni Eropa mengajak enam negara bekas bagian Uni Soviet agar semakin mempererat hubungannya dengan Uni Eropa, daripada mempertahankan hubungan mereka dengan Rusia. Presiden Uni Eropa, Donald Tusk mengatakan tidak banyak manfaat yang bisa diperoleh ke enam negara itu dari Rusia. Komentar itu juga didukung oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel yang mengatakan bahwa, "Uni Eropa memiliki perbedaan jelas dengan Rusia. Kami menghargai jalur apapun yang ditempuh masing-masing ke enam negara itu." Dan didalam konferensi itu juga, Merkel kembali membahas perihal Eastern Partnership yang dinilai merupakan langkah Uni Eropa dalam membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara bekas Uni Soviet yang dulu sempat untuk diinisiasikan oleh beberapa negara, namun mengalami berbagai kendala (Pikiran Rakyat). Upaya Uni Eropa untuk membangun *Eastern Partnership* untuk mempererat hubungan diantara negara-negara anggota. *Eastern Partnership* itu sendiri telah diinisiasikan oleh Uni Eropa bersama dengan Ukraina, Georgia, Moldova, Azerbaijan, Armenia dan Belarus, dimana inisiasi tersebut merupakan sebuah bentuk kerjasama diantara mereka, namun kemitraan tersebut mengalami kendala pada tahun 2013

Dalam merespon upaya Uni Eropa melalui Eastern Partnership dan pembahasan terkait kerjasama diantara negara-negara bekas Uni Soviet, Vladimir Putin memiliki kebijakan tersendiri dengan membentuk sebuah integrasi dalam bidang ekonomi. Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia merupakan langkah strategis

dalam membangun kekuatan tandingan, selain itu alasan dibalik pembentukan Uni Ekonomi Eurasia karena Rusia, Vladimir Putin sebagai penginisiasi menjadikan Uni Ekonomi Eurasia sebagai sebuah cara dalam menghadapi langkah-langkah Uni Eropa yang ingin menggabungkan sejumlah negara persemakmuran seperti Ukraina kedalam Uni Eropa, serta upaya yang dilakukan oleh Rusia Untuk menggabungkan negara-negara yang terpisah dari Uni Soviet ke dalam Uni Ekonomi Eurasia.

Dalam melancarkan upaya-upaya ataupun langkah-langkah agar negara-negara bekas Uni Soviet berkeinginan untuk bergabung ke dalam Uni Ekonomi Eurasia tersebut, Rusia memberikan keistimewaan kepada negara-negara bekas Uni Soviet. Sebagai contoh : pada awal 2014, Presiden Rusia mengumumkan bahwa negaranya akan memberikan pinjaman sebesar dua miliar dolar kepada Belarus. Dalam hal ini, Uni Eropa dan Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya mengkritik adanya Uni Ekonomi Eurasia tersebut dengan menganggap bahwa Uni Ekonomi Eurasia hanya memiliki dampak yang kecil tanpa adanya modernisasi dan reformasi ekonomi yang nyata (Washington Post). Di dalam salah satu surat kabar, The Economist menyatakan bahwa keuntungan bergabung dengan integrasi Uni Ekonomi Eurasia masih belum jelas (The Economist, 2014), kesepakatan yang dibentuk oleh Uni Ekonomi Eurasia bersifat samar-samar dengan rincian teknis yang tersisa masih belum terselesaikan, hal itu membuat Uni Ekonomi Eurasia menjadi sebuah “pertunjukan politik” daripada sebuah ekonomi yang satu (The Economist).

Pada realitanya, Rusia harus berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti : Uni Eropa, NATO, dan lainnya yang telah menjadi ancaman dengan rasionalisasi bahwa Rusia harus membentuk sebuah kekuatan tandingan untuk berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan lainnya yang mengurangi pengaruh Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet. Tindakan Rusia didasarkan pada pengalaman buruk Rusia karena kehilangan pengaruhnya dinegara-negara baltik yang lebih memilih bergabung ke Eropa Barat dan menolak CIS, serta pengaruh Rusia yang sangat kurang di Turkmenistan dan Georgia yang membuat Rusia harus berfikir dalam membuat sebuah kebijakan untuk mempertahankan pengaruhnya di negara-negara bekas Uni Soviet (Karami, 2012).

Uni Ekonomi Eurasia yang dicanangkan Rusia adalah untuk memperbesar pengaruhnya dalam upaya pembentukan “Uni Soviet Modern” yang pada dasarnya tidak akan terlaksana tanpa adanya keanggotaan dari negara-negara bekas Uni Soviet. Tindakan Rusia untuk mempertahankan pengaruh di negara-negara bekas Uni Soviet didasari oleh adanya keinginan dan upaya dari Rusia untuk mendominasi dunia, Gagasan dominasi Rusia terhadap dunia tersebut berdasarkan ajaran Ortodoks yang selama berabad-abad telah menjadi obsesi dan cita-cita politik para penguasa Rusia (Sunaryono, Akar Sejarah Otokrasi Rusia, 2007). Upaya Rusia untuk mendominasi dunia adalah dengan terlebih dahulu mengembalikan pengaruhnya terhadap bekas dari bagian negara Rusia dahulu, dikarenakan negara-negara tersebut dapat menjadi buffer state dalam membantu menjaga keamanan negara Rusia dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sehingga dapat memudahkan Rusia dalam upaya

mendominasi wilayah negara-negara lainnya. Hal itu secara eksplisit digambarkan oleh Vladimir Putin pada November 2011 dengan mengatakan bahwa Uni Ekonomi Eurasia akan membangun kembali nilai terbaik dari Uni Soviet, dimana para kritikus mengklaim hal tersebut adalah cara Rusia melalui pembangunan integrasi untuk mengembalikan Soviet Empire (Reuters, 2011).

Penutup

Pada tahun 2011, Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin mendukung gagasan dari Nursultan Nazarbayev untuk membentuk Uni Ekonomi Eurasia. Di dalam *Foreign Policy Concept* Rusia tahun 2008, Rusia secara spesifik berfokus pada CIS (Commonwealth of Independent States) yang menekankan akan arti pentingnya negara-negara bekas Uni Soviet terhadap Rusia. Rusia pada masa Pemerintahan Vladimir Putin menawarkan sebuah rencana untuk membuat Uni Ekonomi Eurasia yang termuat di dalam sebuah artikel di surat kabar Rusia, Izvestia dengan visi agar negara post Uni Soviet dapat berkoordinasi dalam hal kebijakan luar negeri dan ekonomi yang merupakan sebuah integrasi berdasarkan nilai-nilai baru; dan berlandaskan ekonomi dan politik (G. Bryanski), Presiden Belarus, Kazakhstan, dan Rusia melanjutkan kooperasi yang terjadi ke tahapan yang lebih tinggi dengan menandatangani sebuah perjanjian pada 18 November 2011 yang menetapkan target untuk pembentukan Uni ekonomi Eurasia pada tahun 2015.

Pada tanggal 29 Mei 2014, presiden Kazakhstan, Belarus dan Rusia menandatangani sebuah perjanjian tentang Uni Ekonomi Eurasia yang mulai berlaku pada 1 Januari 2015. Pada dasarnya upaya Rusia untuk meningkatkan integrasi regional dimotivasi oleh adanya kepentingan ekonomi dan politik yang bernilai strategis. Anggota-anggota dari Uni Ekonomi Eurasia adalah Republik Armenia, Republik Belarus, Republik Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan dan Federasi Rusia.

Tujuan pembentukan Uni Ekonomi Eurasia adalah untuk memperbesar Uni Bea Cukai bagi semua negara-negara post-Soviet, termasuk tiga negara Baltik anggota dari Uni Eropa. Uni Ekonomi Eurasia mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, dimana Pengoperasian Uni Ekonomi Eurasia akan meningkatkan pertukaran perdagangan di antara negara-negara anggotanya dengan lebih mudah. Uni Ekonomi Eurasia memiliki tujuan-tujuan utama, yakni penghapusan secara bertahap atas aturan Bea Cukai internal di negara-negara anggota, menempatkan tariff luar negeri, dan menyelaraskan prosedur bea cukai diantara negara-negara anggota. Uni Ekonomi Eurasia menyediakan pergerakan bebas untuk barang, jasa, modal dan tenaga kerja, pencapaian yang terkoordinasi, kebijakan harmonisasi dan tunggal didalam sektor yang ditentukan oleh Perjanjian dan kesepakatan internasional.

Pembentukan Uni Ekonomi Eurasia ini memberikan beberapa pertumbuhan didalam beberapa sektor, antara lain pada bidang produksi gas, industri, dll. Dalam pergaulan internasional, interaksi antar negara dilandasi oleh adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara yang menentukan sikap dan mengatur hubungan

negara tersebut dengan negara lainnya di dalam pergaulan internasional, didalam hal ini, Rusia memiliki kepentingan dalam pembentukan dan perealisasi dari Uni Ekonomi Eurasia, baik Ekonomi dan Politik karena di dalam sebuah integrasi, tidak hanya beranggotakan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi saja tetapi juga terdapat beberapa negara yang memiliki ekonomi lemah yang menjadi anggota, sehingga ketimpangan dalam integrasi tersebut akan memberikan keuntungan yang terpusat kepada negara yang lebih kuat dan memberikan hubungan asimetris diantara Negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia. Rusia memanfaatkan hubungan asimetris tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi negaranya dengan melihat perbedaan ekspor dan impor serta *volume* perdagangan diantara negara-negara anggota yang di dominasi oleh negara Rusia, Selain itu adanya nilai strategis Uni Ekonomi Eurasia bagi ekonomi Rusia adalah sebagai jalan untuk mengurangi upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa, WTO ataupun NATO dengan membentuk kekuatan ekonomi tandingan, serta mengurangi hegemoni tersebut demi terciptanya “Uni Soviet Modern” yang pada dasarnya tidak akan terlaksana tanpa adanya keanggotaan dari negara-negara bekas Uni Soviet serta untuk mempertahankan pengaruh Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet.

Referensi

- BBC News. (2015, April 22). Putin calls for 'Eurasian Union' of ex-Soviet republics.
- Bryanski, G. (2015, April 25). Yahoo! News. Retrieved from Russia's Putin says wants to build Eurasian Union.
- Countries of the World by Area. (2015, April 19). Retrieved from http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_by_area.htm.
- Ekonomi Rusia: Pertanian, Industri, Energi, Transportasi bea cukai. (2015, April 19). Retrieved from <http://id.reingex.com/Russian-Economy.shtml>.
- Jemadu, A. (2008). Politik Global Dalam Teori dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, W. S. (1993). Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, Dan Tatanan Dunia 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kavkaza, V. (n.d.). Eurasian Economic Union to become a bridge between Europe and Pacific Rim. Retrieved oktober 18, 2015.
- Mas' oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
- Rusia dan 4 Negara Bekas Uni Soviet Bangun Aliansi Eurasia, Efektif Per 1 Januari. (n.d.). Retrieved April 25, 2015, from <http://internasional.kompas.com/read/2014/12/24/00124341/Rusia.dan.4.Negara.Bekas.Uni.Soviet.Bangun.Aliansi.Eurasia.Efektif.Per.1.Januari>

- Russia Today. (n.d.). Russia, Belarus, Kazakhstan sign 'epoch' Eurasian Economic Union. Retrieved October 18, 2015
- Russia, Kazakhstan, Belarus Sign Treaty Creating Huge Economic Bloc. (2015, April 20). Retrieved from <http://time.com/135520/russia-kazakhstan-belarus-treaty/>
- Saragih, S. (2008). Peran Putin Dan Eks KGB. Jakarta: Buku Kompas.
- Sunaryono, B. (2007). Akar Sejarah Otokrasi Rusia. *Jurnal Hubungan Internasional*, pp. Vol. 3, No. 1.
- Sunaryono, B. (2012). *Rusia Pasca Komunisme : Jalan Panjang Menuju Perubahan*. Yogyakarta: Prudent Media.
- The Daily Telegraph. (2011, October 6). Kazakhstan welcomes Putin's Eurasian Union concept. Retrieved April 27, 2015
- The Daily Telegraph. (2011, October 6). Kazakhstan welcomes Putin's Eurasian Union concept. Retrieved October 18, 2015
- The Hindu. . (n.d.). Vladimir, Radyuhin. . Retrieved October 18, 2015, from "Three-nation Eurasian union set up as bridge": <http://www.thehindu.com/>.
- The New York Times . (n.d.). Putin Signs Economic Alliance With Kazakhstan and Belarus. Retrieved October 18, 2015, from http://www.nytimes.com/2014/05/30/world/europe/putin-signs-economic-alliance-with-presidents-of-kazakhstan-and-belarus.html?_r=0.
- The Royal Institute Of International Affairs. (2003). *Vladimir Putin And The Evolution Of Russian Foreign Policy*. United Kingdom: Blackwell.
- Uni Ekonomi Eurasia (EEU) Kartu Baru Putin. (2015, April 20). Retrieved from <http://deteksi.co/2015/01/uni-ekonomi-eurasia-kartu-baru-putin/>
- Uni Ekonomi Eurasia, Prospek dan Tantangan. (n.d.). Retrieved Juni 21, 2015, from <http://indonesian.irib.ir/ranah/equilibrium/item/90502-uni-ekonomi-eurasia,-prospek-dan-tantangan>.
- Vladimir, R. (n.d.). The Hindu. Retrieved October 18, 2015, from Three-nation Eurasian union set up as bridge: <http://www.thehindu.com/>
- White, S. (1983). *The USSR : Pattern of Autocracy and Industrialism*. In A. B. (eds.), *Political Culture and Political Change in Communist States* (pp. 25-33). New York: Holmes Meier Publisher.